BAB II
KAJIAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).

2. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).

3. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut:

"Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut". [1]

Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah : [2]

a. Keberhasilan program
b. Keberhasilan sasaran
c. Kepuasan terhadap program
d. Tingkat input dan output
e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai

---

[1]Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 29

[2] Cambel, *Riset dalam Evektivitas Organisasi*,Terjemahan Salut Simamora.(Jakarta: Erlangga, 1989), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokonya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.[3]

Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indicator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula di lakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.[4]

---

[3]Ibid, 47

[4]Soerjono, Soekanto, *Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung:1989), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :[5]

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan awal pemerintah mengeluarkannya kebijakan pembatasan penggunaan kantong plaastik ini adalah untuk mengurangi volume sampah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sampai sejauh mana efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik (kantong plastik berbayar). Efektivitas tersebut dibangun atas lima indikator, yaitu 1) Pemahaman program, 2) Tepat sasaran, 3) Teat waktu, 4) Tercapainya tujuan, 5) Perubahan nyata.

[5]Sutrisno edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2007), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Tentang Kebijakan

1. Definisi Kebijakan

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi "kebijakan". Sedangkan Samodra Wibawa, Muhadjir Darwin, dan Abdul Wahab yang menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan". Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi "kebijakan" atau kebijaksanaan", kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.[6]

Kebijakan memiliki beragam pengertian. Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri memberikan makna kebijakan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu.[7]

Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umu atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau rinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Sejalan dengan makna kebijakan yang

---

[6] Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 35

[7] Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan:Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan oleh United Nation tersebut di atas, pengertian kebijkan adalah "*a proposed course of action of person, group, or goverment within and given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach an goal or relizean objective or purpose"* (.....serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintahdalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).[8]

Pada pengertian lain dikemukakan, bahwa kebijakan itu adalah "*A purposive course of action followed by action or set actors in dealing with a problem with a problem or metier of concern"* (...serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).[9]

Pendapat terakhir tentang kebijakan adalah "*A policy ...consist of web of dicisions and action than allocate values"* (suatu kebijakan terdiri ats serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai).[10]

---

[8] M. Irfan, Islamy, *Policy Analysis: Seri Monografi Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2000)
[9] Abdul Wahab, Solichin, *Reformasi Pelayanan Publik Kajian dari Perspektif Teori Govermance*, (Universitas Brawijaya Malang : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, 1999.
[10] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya masih banyak lagi definisi atau pengertian mengenai kebijakan, namun dari sekian banyak itu tampaknya tidak terdapat adanya perbedaan pendangan secara tajam dalam mengertikan suatu kebijakan. Dari beberapa pendapat di atas mengenai rumusan arti kebijakan, pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa elemen yaitu: 1) adanya serangkaian tindakan; 2) dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang; 3) adanya pemecahan masalah; dan 4) adanya tujuan tertentu.

Bila keempat elemen tersebut dipaadukan maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Meskipun istilah itu dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, yang lebih dikenal dengan kebijakan negara (*public policy*). Pengertian kebijakan negara banyak ahli yang mendefinisikannya sebagaimana halnya pada pengertian kebijakan itu sendiri. Berikut ini hanya dapat dikemukakan beberapa diantaranya, bahwa kebijakan negara sebagai "*is whatever goverment choose to do or do"* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut dikatakan, bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena 'sesuatu yang tidak dilakukan' oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan 'sesuatu yang dilakukan pemerintah'.[11]

Pendapat yang mirip dikemukakan oleh Dye, dijelaskan bahwa kebijakan adalah, "*....is what goverment say and do, or not do,. It is the goals or purposes of goverment programs....*" (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebjakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah....)[12]. Kemudian, pendapat lain mengatakan bahwa, "*Public policy are those developed by goverment bodies and officials*" (kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah[13]. Dan pendapat yang terakhir mengemukan bahwa kebijakan negara, yaitu "*A set of interrelateddecisions taken by a political actor or group of actor concerning the selection where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan

[11] Islamy, M.Irfan, *Policy Analisis: Seri Monografi Kebijakan Publik,* (Malang: Universitas Brawijaya, 2000)
[12] Anderson, James E, *Public Pilicy Making,* (New York: Holt Reinhartwinston, 1979)
[13] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan dari para aktor tersebut)[14].

Dengan pengertian kebijakan negara tersebut di atas bagaimanapun rumusnya, pada hakekatnya bahwa kebijakan negara mengarah kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Seseorang atau sekelompok orang aktor politik harus senantiasa memasukkan pikiran-pikiran publik dalam wacana politiknya, dan bukan hanya pikirannya atau kemauannya semata-mata sebagai dasar pengembilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan negara dapat disimpulkan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan ppemerintah, baik yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (publik).

Dari beberapa pengertian kebijakan negara beberapa elemen penting tentang kebijakan negara (*public policy*), yaitu:

a. Bahwa kebijaakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
b. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
c. Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

[14] Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumu Aksara, 1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat[15].

Seperti halnya pada kebijakan kantong plastik berbayar untuk wadah belanjaan yaang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut menghimbau agar konsumen toko ritel modern membayar sebesar Rp.200 untuk satu lembar kantong plastik. Diharapkan konsumen membawa tas belanja sendiri. Hal ini bertujuan agar bisa menekan tumpukan sampah plastik yang sulit didaur ulang. Terurainya sampah plastik butuh waktu ratusan tahun. Tujuan dari semua konsep di atas adalah untuk mengurangi volume sampah dan sejauh mungkin dimaksudkan untuk membangun paradigma dan kesadaran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan jika secara terus-menerus maasyarakat menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kebijakan Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik (Kantong Plastik Berbayar)

Kebijakan Kantong Plastik Berbayar adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghimbau agar konsumen membayar sebesar Rp 200,00 untuk satu lembar kantong plastik setiap kali berbelanja di minimarket atau supermarket. Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar ini merupakan bagian dari uapaya menjalankan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada pasal 19

[15] M. Irfan, Islamy, *Politic Analysis: Seri Monografi Kebijakan Publik,* (Malang: Universitas Brawijaya, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pasal 20 mengenai kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, khussnya pada sektor ritel serta Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, khusunya pada pasal 12-15.

Kebijakan ini bertujuan mengurangi timbulan sampah di sumber penghasil sampah dan penggunaan kantong belanja plastik melalui penerapan kantong belanja plastik tidak gratis. Penerapan kantong belanja plastik berbayar berlangsung pada toko ritel/toko modern yang berdiri sendiri dan berada dalam pusat perbelanjaan.

Terkait dengan itu, kemudian dikeluarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (Nomor S .1230/P SLB3-PS/2016). Surat ditujukan kepada kepala daerah dan pelaku usaha, mengenai penerapan plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Dalam surat edaran menteri tersebut disepakati kantong plastik berbayar Rp200 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Surat edaran ini dikeluarkan terkait kebijakan diet kantong plastik untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah kantong plastik.[16]

SE 1230/2016 itu menyebutkan bahwa ketentuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”), Yayasan

[16] MNG Laporan Tahunan 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Konsumen Indonesia ("YLKI"), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia ("APRINDO"). Beberapa ketentuan dalam SE 1230/2016 ini antara lain:[17]

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.;
2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu;
5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan

[17]Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility, CSR) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.

6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

Dari pemaparan data di atas, dapat menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kantong plastik yang kurang bijak dapat membahayakan lingkungan, maka dari itu dalam rangka pengurangan sampah kantong plastik yaitu pemerintah mengambil sikap dengan mengatur pembatasan penggunaaan kantong plastik belanja di ritel modern serta dengan mewajibkan seluruh pelaku usaha yang menggunaakan kantong plastik dalam aktivitas usahanya untuk memiliki kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

3. TinjauanTentangRespon

a) Definisi Respon

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (reaction). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban.[18]Respon berasal dari kata response, yang berarti balasan atau tanggapan (reaction). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang di terima oleh panca

[18]http://kbbi.web.id/respons di akses pada 20 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan p artisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecendrungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi, berbicara mengenai respon atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu.[19]

Definisi ini menunjukkan adanya pembagian respon yang oleh Ahmadi dirinci sebagai berikut:[20]

a. Respon positif

   Sebuah bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.

b. Respon negatif

   Bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada. Menurut teori simbolik, individu dalam memberikan respon didasarkan pada

[19] Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003)

[20] Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman mereka terhadap fenomena sosial yang akan mereka respon. Berbeda dengan teori Behavior, dimana individu dalam merespon fenomena sosial tidak didasarkan pada pemahaman mereka terhadap fenomena sosial tersebut.

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa respon adalah reaksi atau jawaban seseorang terhadap sesuatu. Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menolak atau menjauhi objek tersebut. Seperti halnya pada penelitian ini yang membahas mengenai kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik, penulis ingin melihat respon masyarakat terhadap kebijakan. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana respon ibu rumah tangga di Surabaya atas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik.

b) Respon Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik (Plastik Berbayar)

Kebijakan pemerintah melalaui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, berdasarkan Surat Edaran Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016, sejak tanggal 21 Februari melakukan uji coba penerapan kantong plastik berbayar di semua pasar modern di Indonesia. Kebijakan ini tentu saja menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kebanyakan masyarakat tidak setuju dengan kebijakan ini karena dianggap hanya membebani masyarakat dan tidak akan efektif. Sementara di sisi lain, diharapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keebijakan ini dapat mengurangi limbah plastik yang selama ini menjadi salah satu problem. Yang menjadi pertanyaan besar masyarakat adalah kenapa kebijakan ini hanya menyentuh persoalan kantong plastik dan dibebankan kepada konsumen ketika berbelanja? Bukankah produk yang menggunakan kemasan plastik masih sangat banyak dan lebih berbahaya dari kantong plastik, misalnya kemasan minyak sayur, mie instant, air mineral, dan banyak produk-produk yang lain yang menggunakan bahan baku plastik yang sulit terurai.

Kebijakan kantong plastik berbayar ini juga membuat kebanyakan masyarakat bingung adalah dari hasil pantauan ternyata ada beberapa ritel tidak memberitahu konsumen, tiba-tiba harga Rp.200 tersebut langsung masuk ke stroke pembayaran, meskipun sebagian besar toko ritel modern menanyakan pada konsumen untuk mau menggunakan kantong plastik atau tidak.Persoalannya tidak hanya dilihat dari besar kecilnya nilai uang yang harus dibayar oleh konsumen, tapi kebijakan ini dianggap kurang tepat dan tidak efektif. Penerapan kebijakan ini terasa cenderung tidak berpihak pada konsumen atau tidak pro rakyat tetapi lebih kepada pro pasar. [21]

[21]m.wartaekonomi.com diakses pada 24 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik ini menuai kontra di kalangan masyarakat, karena pemerintah dinilai menambah beban masyarakat dan dianggap tidak pro rakyat, dimana masyarakat yang belanja akan dikenakan biaya Rp.200 sebagai pengganti kantong plastik.

C. Konsep Tentang Sampah

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

1. Definisi Sampah

Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.[22] Sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.[23]

[22]Sri Subekti, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan, Available at: http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini Diakses 23 Maret 2016.

[23] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonimis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.[24]

Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi.[25] Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak.

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya.

Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tidak dikehendaki atau sia-sia. [26]Sedangkan yang dimaksud dengan sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota (tidak termasuk sampah yang

[24]S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah,* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983)
[25]E. Colink, *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen,* 1996
[26] Tchobanoglous, *Integrated Solid Waste Management.* (Kogakusha: Mc. Grw Hill, 1993)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbahaya dan beracun). Definisi mengenai sampah, hal ini perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mengenal sampah lebih dekat.[27]

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

2. Sumber Sampah

Sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/ perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah.[28] Sumber dari sampah di masyarakat pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan.[29] Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi antara lain: 1) perumahan, 2) komersil, 3) institusi, 4)

---

[27] Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), 3-4

[28] E. Damanhuri dan Tri Padmi, *Probleme de Dechets Urban en Indonesie, TFE ENTPE (Perancis), 1982 E. Damanhuri (Editor): Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A dan Modul B, Disiapkan untuk PT. Freeport Indoensia,* (Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999).

[29] G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, *Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues.* (Singapore: Mc. Grw Hill, 1993)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstruksi dan pembongkaran, 5) pelayanan perkotaan, 6) unit pengolahan, 7) industri, dan 8) pertanian.

Sampah dapat digolongkan dalam beberapa kategori, penggolongan sampah didasarkan pada sumber sampah, sifat sampah, dan bentuk sampah. Penggolongan jenis sampah ini akan memudahkan bagi kita dalam proses daur ulang atau proses pemanfaatan sampah, karena dari sinilah kita mengenali karakteristik serta kandungan yang terdapat dalam sampah yang akan kita olah atau daur ulang.

Berdasarkan sumbernya sampah dibagi menjadi:[30]

1. Sampah alam adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi msalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.
2. Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil dari pencernaan manusia, seperti *feses* dan *urin.* Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai *vector* (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada *dialektika* manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa *(plumbing).* Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui sistim urinoir tanpa air.

[30]Ibid, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah, kertas dan plastik. Karakteristik dari sampah rumah tangga ini, sebagian besar adalah sampah organik yang mempunyai sifat lekas membusuk Akumulasi dari limbah oleh rumah tangga adalah pengeluaran dalam tong sampah didepan setiap rumah atau di dalam kantong plastik, dalam keadaan bercampur.

4. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah ini, sebagai contoh sampah konsumsi adalah tangkai/ daun singkong, papaya, kangkung, bayam, kulit terong, wortel, labuh siam, ubi, singkong, kulit buah-buahan, nanas, pisang, nangka, daun pisang, semangka, ampas kelapa, sisa sayur/ lauk pauk, dan sampah dari kebun. Jenis sampah ini merupakan sampah yang umum dipikirkan manusia, hal ini disebabkan kebiasaan manusia dalam proses kehidupan sehari-hari sebagai penghasil sampah. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih kecil dibangkingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

5. Sampah perkantoran adalah sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan: yang sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sampah daerah industri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat. Sampah umum, biasanya diletakkan di tempat sampah. Pensortiran sederhana biasanya dilakukan oleh industri, seperti plastik, kertas, dan bagian dari kulit biasanya disimpan dalam container yang berbeda untuk dijual. Sedangkan limbah yang dianggap tidak berharga dibuang ditempat tersendiri. Untuk limbah cair dan limbah berbahaya, jika perusahaan tidak memiliki fasilitas yang memadai atau incinerator atau falistas pengelolaan limbah cair, maka limbah harus dibawa ke fasilitas yang dimiliki oleh departemen pengelolaan sampah di pemerintah kota yang akan diproses lebih lanjut sebelum dibuang.

   Sampah dari fasilitas medis sudah dipisahkan antara sampah medis dan non medis. Sampah non medis dikumpulkan menggunakan kantong plastik dan dikumpulkan dalam sampah container yang dimiliki oleh fasilitas medis. Sementara sampah medis dibawa ke incinerator. Sebagian lembaga medis yang tidak dimliki incinerator, limbah medisnya harus dibawa ke rumah sakit.

7. Sampah Nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Oleh karena itu sampah nuklir disimpan ditempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk melakukan aktifitas tempat-tempat yang dituju biasanya bekas tambang garam atau dasar laut (walau jarang namun kadang masih dilakukan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan tentang sumber sampah di atas, dapat diketahui bahwa sampah plastik termasuk dalam sampah rumah tangga dan sampah perkantoran. Dimana sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di dalam rumah tangga. Sedangkan sampah perkntoran adalah sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan.

3. Jenis-jenis Sampah

Berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik.[31]

a. Sampah Organik

Sampah organik yaitu buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya.Melihat proses penghancurannya oleh jasad-jasad mikroba, maka sampah zat organik terdiri atas:[32]

1) Zat organik dari bahan plastik

Dengan perkembangnya Ilmu Pengetahuan dan disertai berkembangnya Industri, maka banyak barang-barang atau perkakas dibuat dari bahan plastik. Bahan-bahan plastik termasuk zat organik. Kita ketahui semua zat organik dapat dihancurkan oleh jasad-jasad mikroba, akan tetapi zat plastik tidak dapat. Bila dibuang sembarangan maka zat plastik ini hancurnya memakan waktu lama, yaitu antara 40 – 50 tahun, sehingga dikhawatirkan akan bertimbun-timbun sampah dari plastik. Salah satu usaha yang dapat

[31]Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Jakarta: Goysen Publishing, 2009), 2
[32]Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghancurkan zat plastik adalah sinar ultraviolet dari matahari. Ini pun akan memakan waktu yang lama juga, dibandingkan dengan penghancuran zat organik lainnya oleh mikroba-mikroba. Jalan tercepat menghancurkan plastik dapat dimanfaatkan kembali bersama sampah lainnya dapat pula untuk mengurung tanah yang lebih rendah.

2) Zat organik non-plastik

Sampah zat organik bukan dari plastik banyak sekali macamnya, misalnya: kayu, kertas, bekas pakaian, karet, sisa-sisa daging, dana lain-lain. Semua sampah zat organik dapat diuraikan oleh mikroba-mikroba hingga menjadi bahan mineral. Bahan mineral-mineral hasil penguraian ini baik sekali untuk pupuk.

Buangan bahan berbahaya dan beracun (B3), yaitu buangan yang memiliki karakteristik mudah terbakar, korosif, reaktif, dan beracun. B3 kebanyak merupakan buangan dari industri, namun ada juga sebagian kecil merupakan buangan dari aktifitas masyarakat kota atau desa misalnya baterai, aki, disinfektan dan sebagainya.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik yaitu sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya. Contoh sampah dari zat anorganik adalah: potongan-potongan/ pelat-pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, tulang,belulang, dan lain-lain. Sampah jenis ini, melihat fisiknya keras maka baik untuk peninggian tanah rendah atau dapat pula untuk memperluas jalan setapak. Tetapi bila rajin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengusahakannya sampah dari logam dapat kembali dilebur untuk dijadikan barang yang berguna, batu-batuan untuk mengurung tanah yang rendah atau memperkeras jalan setapak, pecahan gelas dapat dilebur kembali dan dijadikan barang-barang berguna, dan tulang-belulang bila dihaluskan (dan diproses) dapat untuk pupuk dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas tentang jenis-jenis sampah, dapat diketahui bahwa plastik termasuk jenis sampah anorganik yaitu sampah sisa material sintetis, serta jika dilihat dari proses penghancurannya, plastik termasuk zat organik. Kita ketahui semua zat organik dapat dihancurkan oleh jasad-jasad mikroba, akan tetapi zat plastik tidak dapat. Bila dibuang sembarangan maka zat plastik ini hancurnya memakan waktu lama, sehingga dikhawatirkan akan bertimbun-timbun sampah dari plastik.

4. Bentuk Sampah

Berdasarkan bentuknya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah padat dan sampah cair.

a. Sampah Padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga: sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Berdasrkan kemampuan diurai oleh alam *(biodegradability)*, maka dapat dibagi lagi menjadi:[33]

[33]Ibid, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Biodegradable* adalah sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob atau anaerob, seperti: sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.

2) *Non-biodegradable* adalah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Dapat dibagi menjadi :

   - *Recyclable* : sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.
   - Non-*recyclabel*: sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti tetra packs, carbon paper, thermo coal dan lain-lain.

b. Sampah Cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

1) Limbah hitam sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung pathogen yang berbahaya.

2) Limbah rumah tangga sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung pathogen.

Pembuangan sampah cair atau limbah cair secara sembangan, misalnya membuang ke selokan atau ke sungai-sungai akan menimbulkan bau tidak sedap, juga mengganggu habitat hidup lingkungan sungai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan bisa mengakibatkan berbagai jenis penyakit bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat pembuangan limbah industri.

Dari pemaparan di atas tentang bentuk sampah, dapat diketahui bahwa plastik termasuk bentuk sampah padat yaitu segala bahan buangan selain kotoran manusia dan urine, juga dapat berupa sampah rumah tangga. Serta jika dilihat dari kemampuan daya urainya, sampah plastik termasuk sampah yang tidak bisa diurai oleh proses biologi *(Non-biodegradable)* dan karna sifatnya yang sulit diurai oleh alam maka sampah plastik termasuk *Recyclable,* yaitu sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah ada yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir.

Penelitian ini berjudul (Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik.[34] Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sampah di DIY belum menjadi prioritas seperti halnya sampah di beberapa kota besar. Cakupan pelayanan terbaik ada di Kota Yogyakarta yaitu dapat melayani 90

[34]Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir, *Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik; Government Policy in Domestic Waste Management,* (Skripsi: 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persen daerah. Demikian halnya untuk sampah yang terangkut ke TPA paling banyak adalah Kota Yogyakarta (34,89%), sedangkan terendah berada di Kabupaten Bantul (1,91%).

Dampak kebijakan pengelolaan sampah pada perubahan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di lima kabupaten/kota di DIY relatif sama, yaitu bersih, asri, dan nyaman. Pemerintah lewat kebijakannya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola sampah. Hal tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat sehingga daya dukung lingkungan dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Keuntungan ekonomi diperoleh masyarakat ketika mau mengelola sampah secara mandiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mempuyai persamaan pembahasaan pada kebijakan lingkungan khusunya dalam masalah sampah domestik. Hanya saja yang dilakukan oleh Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir lebih menekankan pada pengelolaan sampah domestik.

2. Fatma Yanty Fakobun

Penelitian ini berjudul (Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peneglolaan Lingkungan di Kota Tual).[35]Hasil penelitian ini menunjukkaan, *pertama,* berdasarkan jawaban terhadap responden tentang Apakah sudah dilakukan perumusan kebijakan yang strategis oleh pemerintah daerah? maka

[35]Fatma Yanty, *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peneglolaan Lingkungan di Kota Tual* (Skripsi: 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden yang menjawab “Ya” sebesar 14 (74%) orang. Kemudian untuk pertanyaan kedua Apakah implementasi kebijakan strategi yang tepat sudah dijalankan terdiri dari, responden yang menyatakan “Ya” sebesar 14 (74%) orang. Selanjutnya pertanyaan Apakah ada evaluasi kebijakan dalam upaya perbaikan secara berkelanjutan, maka responden yang menyatakan “Ya” sebesar 14 (74%) orang. *Kedua,* apakah ada perbaikan tatanan ekosistim kondisi sumber daya alam? maka responden yang menjawab “Ya” sebesar 13 (68%) orang. Kemudian pertanyaan tentang apakah ada upaya campur tangan masyarakat terhadap kualitas lingkungan? maka responden yang menjawab “Ya” sebesar 12 (63%) orang, serta apakah ada factor kependudukan yang berdampak pada pencemaran lingkungan? Maka responden yang menjawab “Ya” sebesar 12 (63%) orang. *Ketiga,* pengaruh yang terjadi antara kebijakan pemerintah daerah memiliki pengaruh “Kuat” terhadap pengelolaan lingkungan di kota Tual sebesar 0,73.

Demikian dilihat dari beberapa contoh penelitian terdahulu yang disampaikan di atas terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana perbedaan tersebut terletak pada objek yang diteliti, yaitu ibu rumah tangga, sebab penulis belum menemukan penelitian mengenai efektivitas kebijakan, terutama penelitian ini menitikberatkan kepada ibu rumah tangga yang ada di Surabaya. Disini penulis ingin mendeskripsikan respon ibu rumah tangga tentang kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik, menganalisis efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik terhadap penggunaan kantong plastik ibu rumah tangga di Surabaya dan menganalisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seberapa besar pengaruh kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik terhadap penggunaan plastik ibu rumah tangga di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kerangka Berfikir

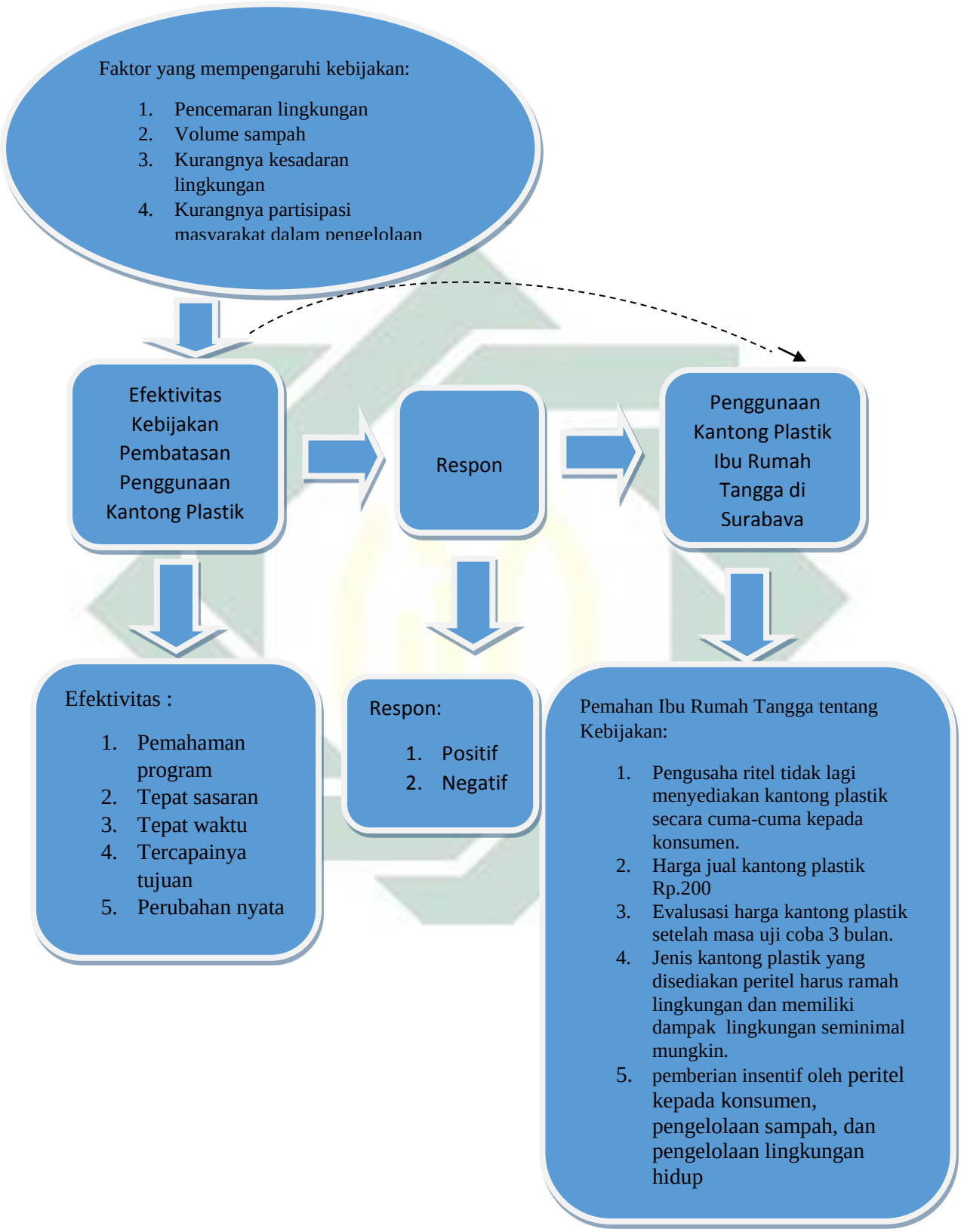

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik berpengaruh terhadap penggunaan kantong plastik ibu rumah tangga dapat dimaknai bahwa dengan efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik yang nantinya akan membentuk respon atau jawaban ibu rumah tangga dalam menanggapi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik yang kemudian akan mempengaruhi penggunaan kantong plastik pada ibu rumah tangga.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penulisan, di mana rumusan masalah penulisan telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penulisan, belum jawaban yang empirik.[36] Jenis hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ho (H nol), yaitu hipotesa yang menayatakan ketiadaan hubungan antara variabel yang sedang dipersoalkan.
2. Hipotesa alternative (Ha), yaitu hipotesa yang menyatakan keberadaan hubungan di antara variabel yang sedang dipersoalkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

[36]Sugiyono, *Metode Penelitihan Kombinasi (Mixed Methodes)* (Bandung: Alfafabeta, 2010), 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ho :Tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik terhadap penggunaan kantong palstik ibu rumah tangga di Surabaya.
2. Ha : Ada pengaruh positif yang signifikan antara efektivitas kebijakan pembatsasan penggunaan kantong plastik terhadap penggunaan kantong plastik ibu rumah tangga di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id